



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI IV DPR RI
DENGAN
ESELON I KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN RI**

Tahun Sidang : 2021-2022
Masa Persidangan : V
Rapat Ke- : 8 (Delapan)
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Selasa, 7 Juni 2022
Waktu : pukul 10.45 s.d. 13.45 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI
Gedung Nusantara I (KK-IV)
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
Ketua Rapat : H. Dedi Mulyadi, S.H.(Wakil Ketua Komisi IV DPR RI
/ F-PG)
Acara : Membahas RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2023
Sekretaris Rapat : Drs. Achmad Agus Thomy (Kepala Bagian
Sekretariat Komisi IV DPR RI)
Hadir : A. Anggota Komisi IV DPR RI:
45 dari 52 orang Anggota dengan rincian:

1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
10 dari 11 orang Anggota
 - 1) Sudin, S.E./Ketua Komisi IV DPR RI
 - 2) Riezky Aprilia, S.H., M.H.
 - 3) H. Sunarna, S.E., M.Hum.
 - 4) Ir. Mindo Sianipar - Virtual
 - 5) Yohanis Fransiskus Lema, S.IP., M.Si.
 - 6) Drs. I Made Urip, M.Si. - Virtual
 - 7) Dr. H. Sutrisno, S.E., M.Si.
 - 8) Vita Ervina, S.E., M.B.A.
 - 9) Maria Lestari, S.Pd.
 - 10) Drs. Djarot Saiful Hidayat, M.S. - Virtual
2. Fraksi Partai Golongan Karya
7 dari 7 orang Anggota
 - 1) H. Dedi Mulyadi, S.H./Wakil Ketua
Komisi IV DPR RI
 - 2) H. M. Salim Fakhry, S.E., M.M.
 - 3) Firman Soebayo, S.E., M.H. - Virtual
 - 4) Ir. H. Hanan A. Rozak, M.S.
 - 5) Ir. Panggah Susanto, M.M. - Virtual

- 6) Alien Mus
- 7) Teti Rohatiningsih, S.Sos.
3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya
5 dari 7 orang Anggota
 - 1) G. Budisatrio Djiwandono/Wakil Ketua Komisi IV DPR RI
 - 2) Ir. H. T. A. Khalid, M.M.
 - 3) Dr. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.Sc.
 - 4) Ir. Dwita Ria Gunadi
 - 5) Dr. Azikin Solthan, M.Si.
4. Fraksi Partai Nasional Demokrat
5 dari 6 orang Anggota
 - 1) H. Sulaeman L. Hamzah
 - 2) Ir. Abdullah Tuasikal -Virtual
 - 3) Julie Sutrisno
 - 4) Yessy Melania, S.E. -Virtual
 - 5) Ir. Hj. Sri Kustina -Virtual
5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
5 dari 6 orang Anggota
 - 1) Anggia Erma Rini, M.K.M./Wakil Ketua Komisi IV DPR RI
 - 2) H. Muhtarom, S.Sos.
 - 3) Daniel Johan, S.E.
 - 4) Drs. H. Ibnu Multazam
 - 5) Edward Tanur, S.H.
6. Fraksi Partai Demokrat
5 dari 5 orang Anggota
 - 1) Dr. Suhardi Duka, M.M.
 - 2) Drs. H. Guntur Sasono, M.Si.
 - 3) Hj. Nur'aeni, S.Sos., M.Si. -Virtual
 - 4) Muhammad Dhevy Bijak Pawindu - Virtual
 - 5) Bambang Purwanto, S.ST., M.H.
7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
5 dari 5 orang Anggota
 - 1) drh. H. Slamet
 - 2) Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, SP., M.M. -Virtual
 - 3) Dr. Hermanto, S.E., M.M.
 - 4) H. Johan Rosihan, S.T.
 - 5) Saadiah Uluputty, S.T.
8. Fraksi Partai Amanat Nasional
1 dari 3 orang Anggota
 - 1) H. Muhammad Syafrudin, S.T., M.M.

9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
2 dari 2 orang Anggota
 - 1) Ema Umriyyatul Chusnah -Virtual
 - 2) K.H. Asep A. Maoshul Affandy, M.Pd.I.
-Virtual

- B. Anggota Izin
Fraksi Partai Amanat Nasional
- 1) H. Muhammad Syafrudin, S.T., M.M.

- C. Pemerintah
1. Sekretaris Jenderal (Drs. Antam Novambar, S.H., M.Hum.);
 2. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap (Dr. Ir. Muhammad Zaini Hanafi, M.Si.);
 3. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya (Dr. TB. Haeru Rahayu, A.Pi., M.Sc.);
 4. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ir. Artati Widiarti, M.A.);
 5. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Laksda TNI Adin Nurawaluddin, M.Han.);
 6. Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (Dr. I Nyoman Radiarta, S.Pi., M.Sc.);
 7. Plt. Inspektur Jenderal (Hadi Pramono, S.E., M.Si.);
 8. Plh. Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Ir. Teguh Samudro, M.P.);
 9. Kuasa Direktur Jenderal/ Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Hendra Yusran Siry);
 10. Direktur Utama PT Garam (Persero) (Arif Haendra);
 11. Kuasa Direktur Utama/Direktur Operasional PT Perikanan Indonesia (Fajar Widiasono);

Jalannya Rapat:

KETUA RAPAT (H. DEDI MULYADI, S.H./WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Sekretaris Jenderal dan seluruh pejabat Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan,
Yang saya hormati Direktur Utama PT Perikanan Indonesia,

Yang saya hormati Direktur Utama PT Garam (Persero), ini yang setiap hari mudah-mudahan senantiasa sehat karena kalau makan garam tiap hari kan tekanan darah naik juga gitu.

Mengawali rapat hari ini kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* semoga seluruh kegiatan pada pagi hari sampai siang hari ini dalam keadaan lancar dan melahirkan sesuatu yang memiliki manfaat bagi kepentingan dunia Perikanan dan Kelautan Indonesia, ini yang paling penting. Dan kemudian ada titik tekan saya hanya mengingatkan pada kegiatan-kegiatan masa lalu mohon dievaluasi secara komperhensif. Di perikanan air tawar misalnya, ini saya yang mengalami sendiri bahkan pada akhirnya tidak mau membagikan pada kelompok tani. Apa itu? Pertama, susah Pak kalau nanam ikan, ikannya segede gini tuh jangankan tumbuh, mati karena dia pindah dari satu habitat ke habitat yang lainnya, resikonya terlalu tinggi matinya. Kalau sudah mati berarti investasi yang dikeluarkan oleh negara untuk mengembangkan pengembangan perikanan air tawar rakyat itu mengalami *problem*. Nanam segini aja masih beresiko, apalagi yang segini. Nanam segini aja juga belum tentu gede, kalau bibitnya jelek. Kalau bibitnya jelek nanti sudah segede gini nanti bertelur.

Yang kedua, yang lebih parah lagi adalah pakan yang diterima itu kalau dikasih ke ikan bukannya ngegedein, mati, mati. Saya mungkin kadar kadarnya rendah sekali ini ke pakan dan baunya luar biasa, sudah baunya luar biasa itu tidak punya *impact* akhirnya ya kita buang saja. Nah, ini kan kalau kalau pakannya yang bermutu kan tidak terlalu bau. Nah, saya saran deh nanti kegiatan-kegiatan proyek-proyek itu lebih baik sedikit tapi bermutu dan melahirkan produktivitas tinggi, dibanding banyak terbuang karena kita menginginkan sesuatu itu bermanfaat bukan hanya sekedar memenuhi nomenklatur anggaran, bukan sekedar melaksanakan operasional. Kalau tidak melahirkan *impact* bagi kehidupan masyarakat bagi pertumbuhan, lebih baik ditinggalkan saja tidak usah dilaksanakan. Ini ini pesan saya, nanti ada pesan lagi yang untuk di Kelautan.

Nah, untuk itu pada kesempatan pagi hari ini sesuai dengan Pasal 276 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib RDP pada hari ini kami nyatakan dibuka untuk umum. Setuju?

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.45 WIB)

RDP hari ini dimulai pukul 10.45 menit dan nanti berakhir mudah-mudahan bisa pukul 13.00 WIB.

Nah, sesuai dengan Pasal 254 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib atau atas kesepakatan bersama, maka susunan acaranya sebagai berikut:

1. Pengantar Ketua Rapat;
2. Penjelasan para pejabat Eselon I terhadap agenda rapat;
3. Tanggapan Anggota Komisi IV DPR RI;
4. Jawaban para Pejabat Eselon I;
5. Kesimpulan Rapat;

6. Penutup.

Setuju?

(RAPAT:SETUJU)

Bapak dan Ibu yang saya hormati,

Rapat Dengar Pendapat/RDP hari ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja antara Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan tanggal 31 Mei 2022 yang lalu bahwa Pagu Anggaran Alokasi Anggaran Belanja atau K/L Tahun 2023 untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp6,1 triliun. Nah, ini kan sebenarnya angka ini sangat kecil dibanding dengan luasnya lautan di Indonesia dan luasnya areal perikanan di Indonesia, Rp6,1 triliun untuk seluas tanah Indonesia eh seluas laut Indonesia ini. Tetapi kita punya pengalaman para Anggota Komisi IV yang dulu ketika dikasih belanja cukup, waktu itu tidak dibelanjakan, dampaknya hari ini kita hanya sebagian mungkin setengahnya dibanding anggaran dulu Bu Endang ya. Yang terdiri dari belanja operasional sebesar Rp2,81 triliun dan belanja non operasional sebesar Rp3,28 triliun.

Selanjutnya hal yang perlu diketahui berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau MD3, pada:

1. Pasal 72: *"Anggota DPR RI mempunyai tugas antara lain melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah serta menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat"*.
2. Pasal 78: *"Bersumpah berjanji bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakil dan untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia"*.

Nah, ini diantara aspirasi. Kalau kita keliling ke seluruh hampir kampung nelayan di Indonesia itu rata-rata tingkat kemiskinannya sangat tinggi. Tingkat kemiskinan sangat tinggi itu ada 3 hal saya lihat di situ, Pak.

Yang pertama, rata-rata nelayan itu tidak memiliki kecukupan modal secara turun-temurun pasti bekerja di toke. Andaikata ingin mencari modal walaupun program pemerintah saya dengungkan banyak, tetap Pak yang berkuasa di daerah jaringan nelayan itu adalah rentenir. Kalau orang Bekasi, orang Karawang, orang Indramayu, itu yang berkuasa itu Bank Emok, kalau ingin dapat tinggal angkat tangan, "aku berjanji pinjam sejuta", terimanya 900, 100.000 untuk biaya administrasi, besoknya harus sudah nyetor lagi. Ini terjadi masif, itu terjadi masif di berbagai tempat, ini mengikat mereka, nah sehingga mereka tidak bisa lepas dari itu.

Nah kemudian yang berikutnya adalah bahwa hanya modal perahu ketinting yang kecil itu mereka itu tidak punya, mereka itu tidak punya rata-rata sehingga mereka harus pinjam lagi. Yang kedua, tingkat huniannya rata-rata

tidak layak. Setelah tingkat hunian yang tidak layak, ini yang ketiga nih, ini harus terintegrasi antara kelautan dengan keluarga berencana rata-rata tidak ber-KB, Pak, silakan Bapak riset. Satu rumah diisi oleh 11 orang, satu rumah diisi 10 orang, masih hamil anak ke-7, masih hamil anak ke-8. Saya di berbagai titik saya menemukan kasus yang sama, baik yang mengambil ikan di danau maupun yang mengambil ikan di laut kasusnya sama, bisa dilihat di vlog-vlog yang saya buat, itu kasusnya sama. Bahwa untuk itu meningkatkan kesejahteraan nelayan tidak melulu hanya persoalan meningkatkan produktivitas, tetapi harus mulai terintegrasi dengan menata kehidupan mereka dengan baik. Menata rumahnya, menata Keluarga Berencananya karena tangkapan banyak kalau anaknya 12 tetap saja repot. Ini, ini *problem* yang saya temui.

Untuk itu Pasal 81, Anggota DPR RI berkewajiban, antara lain:

- Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- Memberikan pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituen di daerahnya masing-masing.

Jangan sampai lagi kami mengalami konstituen kami menerima ikannya segede jarum, pakannya bau, di tanam mati, ini jangan sampai begitu. Dan saya juga ingin konstituen kami menerima perahu-perahu kecil agar mereka tidak terjerat pinjam terus ke toke atau ke Bank Emok.

Untuk itu dalam rangka mendukung program dan kegiatan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia diperlukan komitmen dan sinergitas dengan Komisi IV DPR RI secara bersama-sama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

Demikian pengantar yang kami sampaikan.

Selanjutnya dipersilakan kepada Bapak Sekretaris Jenderal, ini orang yang melebihi Menteri sebenarnya karena Menteri jabatannya cuma Menteri. Kalau ini 2 jabatannya, dia Sekretaris, dia Jenderal, ditambah ditambah lagi Jenderal Polisi jadi 3 jabatannya, Sekretaris, jenderal, Jenderal.

Silakan Pak yang sekarang menguasai kelautan. Untuk itu dipersilakan memberikan penjelasan.

Terima kasih.

SEKJEN KKP (Drs. ANTAM NOVAMBAR, S.H., M.Hum):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat pagi,
Salam sejahtera,

*Om Swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan.*

Yang terhormat Ketua, para Wakil Ketua, Bapak dan Ibu Komisi IV DPR RI,

Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* karena atas karunia-Nya kita bisa hadir dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan kita selalu sehat selalu, *aamiin*.

Ketua, Wakil Ketua, dan para Anggota Komisi IV yang kami hormati,

Untuk target indikator kinerja utama yang akan dicapai KKP di RKP 2023, yaitu:

1. Pertumbuhan PDB perikanan 4 sampai 6%;
2. Produksi perikanan 30,37 juta ton, terdiri dari perikanan tangkap 8,73 ton dan Perikanan budidaya 21,58 juta ton;
3. Ekspor hasil perikanan senilai 7,66 miliar;
4. Angka konsumsi ikan besar 61,02 kg per kapita;
5. Nilai tukar nelayan di 107;
6. Luas kawasan konservasi 29,1 juta hektar; dan
7. Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan sebesar 97%.

Berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Bappenas tanggal 18 April 2022, perihal pagu indikatif belanja Kementerian/Lembaga di tahun anggaran 2023, KKP mendapatkan pagu indikatif tahun 2023 sebesar Rp6,1 triliun. Usulan pagu indikatif KKP Tahun Anggaran 2023 berdasarkan unit kerja Eselon I, yaitu:

1. Sekretaris Jenderal sebesar Rp600,07 miliar;
2. Ditjen, Inspektorat Jenderal sebesar Rp80,31 miliar;
3. Ditjen Perikanan Tangkap Rp838,3 miliar;
4. Untuk Perikanan Budidaya Rp1,07 triliun;
5. Untuk Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan sebesar 936 miliar, ulangi, Rp936,26 miliar;
6. Untuk Ditjen Penguatan Daya Saing sebesar 358 koma, Rp358,5 miliar;
7. Ditjen Pengelolaan Ruang Laut Rp360 miliar;
8. Untuk Badan Riset dan SDM Kelautan sebesar Rp1,34 triliun;
9. Untuk Badan Karantina sebesar Rp513,5 miliar.

Sedangkan berdasarkan program, yaitu:

1. Untuk program pengelolaan perikanan kelautan sebesar Rp2 triliun;
2. Program nilai tambah dan daya saing Rp157,15 miliar;
3. Program kualitas lingkungan hidup Rp83,63 miliar;
4. Program pendidikan dan pelatihan vokasi Rp280,5 miliar;
5. Program dukungan manajemen sebesar Rp3,58 triliun.

Berdasarkan jenis belanja, pagu indikatif KKP Tahun 2023 terdiri dari:

- Belanja operasional yaitu sebesar Rp2,82 triliun; dan
- Belanja non operasional sebesar Rp3,28 triliun.

Sedangkan berdasarkan sumber pendanaan terdiri dari:

- Rupiah Murni sebesar Rp5,83 triliun;
- Pinjaman Hibah Luar Negeri Rp76,54 miliar;
- PNBP sebesar Rp138,15 miliar; dan
- PNBP-BLU sebesar Rp59,67 miliar.

Ketua, Wakil Ketua, dan para Anggota Komisi IV yang kami hormati,

Guna mendukung pelaksanaan pembangunan Kelautan dan Perikanan, KKP telah merancang kegiatan prioritas tahun 2023 yang akan diberikan untuk kepentingan para nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar, petambak garam, dan masyarakat pesisir lainnya. Usulan kegiatan prioritas KKP tahun 2023 adalah:

1. Perikanan Tangkap, antara lain untuk:
 - a. Implementasi penangkapan ikan terukur di 11 WPP, antara lain:
 - Penyusunan alokasi sumberdaya ikan;
 - Alokasi usaha dan kuota;
 - Sistem data.
 - Selain itu,
 - b. Pengembangan Kampung Nelayan Maju sedang dengan dukungan sinergi kegiatan pemberdayaan nelayan, antara lain:
 - Bantuan sarana prasarana untuk nelayan;
 - Asuransi bagi nelayan dan pengembangan korporasi nelayan.
2. Untuk Perikanan Budidaya, antara lain pengembangan perikanan budidaya untuk peningkatan ekspor 4 komoditas, yaitu: Udang; Lobster; Kepiting; dan Rumput Laut.
3. Penguatan daya saing produk kelautan, antara lain untuk:
 - Peningkatan konsumsi ikan;
 - Pembangunan sistem rantai dingin;
 - Pengembangan usaha dan investasi; dan
 - Pameran produk skala internasional.
4. Pengelolaan Ruang Laut, antara lain untuk:
 - Pengelolaan kawasan konservasi di pulau-pulau kecil;
 - Pengelolaan garam rakyat; dan
 - Perizinan kesesuaian pemanfaatan ruang laut.
5. Pengawasan Sumber Daya Kelautan, antara lain untuk:
 - Pengawasan ikan terukur;
 - Pengawasan usaha sektor Kelautan dan Perikanan.
6. Pengembangan SDM, antara lain untuk:
 - Pelatihan usaha bagi masyarakat;
 - Penyuluhan bagi kelompok usaha;
 - Pendidikan vokasi bagi masyarakat; dan
 - Inkubasi usaha Kelautan dan Perikanan.
7. Karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, antara lain untuk:
 - Penerapan penerapan sistem jaminan mutu;
 - Pengembangan karantina ikan; dan
 - Pengembangan laboratorium.

Ketua, Wakil Ketua, dan para Anggota Komisi IV yang kami hormati,

Mohon izin.

Kami telah mencoba menyusun rancangan kegiatan untuk masyarakat Kelautan dan Perikanan di tahun 2023 yang dapat mendukung aspirasi dalam rangka meningkatkan usaha dan pendapatannya.

Selanjutnya, kami mohon saran dan masukan lebih lanjut untuk perbaikan program dan kegiatan pembangunan Kelautan dan Perikanan sehingga tepat sasaran, tepat waktu, dan akuntabel.

Dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan Kelautan dan Perikanan KKP mengusulkan tambahan anggaran pagu indikatif di tahun 2023 yang lalu adalah 2,25, sekarang kami minta tambah jadi 4,25 triliun meningkat 2,1 triliun dari usulan Raker pada tanggal 31 Mei, sehingga usulan pagu anggaran KKP tahun 2023 menjadi sebesar Rp10,35 triliun. Usulan anggaran tersebut, antara lain untuk:

- Sarana prasarana pelabuhan perikanan penangkapan penangkapan ikan terukur dan PNBK pasca produksi;
- Pembangunan kampung nelayan maju;
- Dukungan pengembangan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional;
- Pendampingan kegiatan PHLN;
- Operasional Pengembangan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- Sistem rantai dingin;
- Pembangunan Sarpras niaga garam, sarpras wisata bahari;
- Penambahan kegiatan pelatihan penyuluhan masyarakat;
- Peningkatan sistem karantina ikan.

Adapun rincian usulan tambahan anggaran sebagaimana tertera dalam bahan yang telah kami sampaikan.

Ketua, Wakil Ketua, dan para Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati,

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan terkait Rencana Kerja dan Anggaran KKP pada Pagu Indikatif KKP Tahun 2023.

Kami mohon dukungan terhadap usulan rencana kerja dan anggaran kami tersebut. Seluruh saran, masukan, rekomendasi akan kami menjadi bahan acuan untuk perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Terima kasih atas penjelasannya dari Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Selanjutnya dipersilakan dari mulai Tuanku Khalid dari lautan Banda Aceh. Aceh tuh lautnya laut apa namanya?

F-P.GERINDRA (Ir. H.T.A. KHALID, M.M.):

Selat Malaka.

KETUA RAPAT:

Oh Selat Malaka. Dipersilakan.

F-P.GERINDRA (Ir. H.T.A. KHALID, M.M.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pak Ketua, Wakil Ketua, teman-teman Anggota Komisi IV yang saya banggakan,
Pak Sekjen, Pak Dirjen para Staf sekalian yang hadir.

Izinkan saya mengawali ini atas nama Fraksi Partai Gerindra, hari ini dipercayakan oleh Pimpinan sebagai Jubir Fraksi Gerindra untuk menyampaikan beberapa masukan yang telah dirangkum oleh Fraksi Gerindra untuk saya sampaikan pada rapat hari ini.

Pertama sekali kami ingin memberikan masukan dari Fraksi Gerindra terhadap Sekretaris Jenderal, di mana sejalan dengan komitmen dukungan Fraksi Partai Gerindra terhadap Rencana Program dan Anggaran KKP Tahun 2023 yang telah disampaikan dalam Rapat Kerja antara Komisi IV DPR RI dengan Menteri KKP tanggal 31 Mei tahun 2022 dan meminta menuntaskan, meminta untuk menuntaskan dan memperhatikan program-program prioritas yang masih belum selesai. Ini menjadi perhatian karena kemarin Fraksi Gerindra telah menyampaikan ini juga maka pada rapat hari ini Fraksi Gerindra kembali meminta dan mengingatkan agar Eselon I dapat memperhatikan dan memprioritaskan program-program kerja yang belum selesai yang telah direncanakan agar apa yang telah kita sepakati direncanakan tentunya dapat maksimal.

Yang kedua Pak Sekjen, Fraksi Gerindra mempertanyakan anggaran layanan penyiapan produk hukum pada program dukungan manajemen Sekretariat Jenderal sebesar 10 miliar, Rp10,5 miliar. Kami mengingatkan agar anggaran tersebut harus benar-benar dimanfaatkan sepenuhnya untuk mendapatkan produk hukum yang tidak merugikan masyarakat, dalam artian bahwa situasi nelayan tidak kontraproduktif dengan peraturan yang kita keluarkan.

Kemudian Pak Sekjen, Fraksi Gerindra juga meminta terkait peran dan dukungan KKP untuk pembangunan Kelautan dan Perikanan yang terintegrasi dan berkelanjutan di kawasan IKN. Fraksi Gerindra meminta Sekretaris Jenderal KKP untuk memperhatikan beberapa catatan kritis:

1. Kami meminta KKP untuk memodernisasi dan menambahkan armada penangkapan serta alat tangkap nelayan ikan yang canggih dan berdaya saing tinggi dalam mendukung kedaulatan pangan di kawasan IKN;
2. Kami meminta KKP untuk merevitalisasi dan merekonstruksi prasarana dan sarana TPI/PPI dan lahan tambak yang terbengkalai seperti di daerah Paser, Kutai Kartanegara, dan Penajam Paser Utara.

Kemudian kami Fraksi Gerindra juga ingin menyampaikan kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Permasalahan penangkapan ikan yang masih merusak lingkungan masih marak terjadi di sejumlah wilayah perairan Indonesia, penyelundupan dan penggelapan hasil perikanan laut, pemahaman nelayan yang rendah terhadap izin wilayah perairan tangkap dan sebagainya. Oleh karena itu, kami Fraksi Partai Gerindra meminta Direktur Jenderal PSDKP untuk proaktif merencanakan, memperbanyak, dan meningkatkan alokasi anggaran yang signifikan terhadap peningkatan kapasitas nelayan melalui bimbingan teknis dan kegiatan-kegiatan partisipatif lainnya bersama Komisi IV DPR RI.

Kemudian kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Fraksi Partai Gerindra meminta kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap supaya merencanakan meningkatkan alokasi anggaran yang signifikan terutama untuk meningkatkan infrastruktur dan fungsi Pelabuhan Perikanan, misalnya pengerukan Pelabuhan Perikanan yang dangkal dan pembangunan rantai dingin yang memadai. Selanjutnya meminta KKP terkait pengadaan kapal *boat* untuk nelayan kecil wajib ditingkatkan dan mengkaji ulang sistem penganggarnya yang dilimpahkan ke daerah atau PPI karena selama ini menyulitkan kami, Komisi IV dalam melakukan pengawasan peruntukkan dan fungsi pemanfaatan untuk nelayan. Ini mohon perhatian Pak Dirjen Tangkap, tadi kita juga telah bicarakan menyangkut dengan bantuan *boat* 5 GT kepada kami aspirasi Anggota Dewan juga bermasalah di Aceh.

Kemudian pada kesempatan ini juga Pak Dirjen Tangkap, saya kembali mengingatkan janji Pak Menteri terhadap pengerukan pelabuhan nusantara di Banda Aceh, Lampulo yang pernah dijanjikan pada rapat kemarin sekitar 50 miliar hasil Kunker Pak Dedi ya yang dijanjikan waktu itu. Jadi masyarakat di sana terus mempertanyakan karena ada janji kita.

Kemudian kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. Kami, Fraksi Gerindra meminta Direktur Jenderal Perikanan Budidaya untuk meningkatkan alokasi anggaran dan sektor-sektor budidaya komoditas strategis seperti Ikan Kerapu, Bandeng, Udang Windu, Kepiting, Rumput Laut, serta menginventarisir merevitalisasi tambak-tambak yang terbengkalai seperti banyak sekali terjadi di Aceh di daerah Aceh dan juga di daerah-daerah lainnya di Indonesia.

Kemudian kepada Direktorat Jenderal Pengolahan Ruang Laut. Selama ini Direktorat Pengolahan Ruang Laut (DJPRL) sangat minim kegiatan kolaboratif, partisipatif yang dilakukan bersama Komisi IV. Oleh karena itu, kami Fraksi Partai Gerindra minta Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

untuk segera merencanakan dan mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan kapasitas masyarakat pesisir melalui bimbingan teknis dan kegiatan-kegiatan kolaboratif, partisipatif lainnya bersama Komisi IV.

Kemudian kepada Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. Kami, Fraksi Partai Gerindra meminta kepada Kepala BRSDMKP untuk meningkatkan kapasitas, memberikan *reward and punishment*, dan mengkaji ulang dengan cermat terkait keluhan-keluhan penyuluh kelautan perikanan yang tersebar di seluruh Indonesia. Misalnya mencari skema regulasi pengangkatan penyuluh menjadi ASN atau P3K yang dianggap patut dan layak karena penyuluh-penyuluh tersebut merupakan orang-orang di garda terdepan dalam menyukseskan tujuan utama pembangunan negara dalam sektor Kelautan dan Perikanan, apalagi mungkin nanti honorer itu sudah tidak boleh lagi, ini perlu perhatian kita yang serius karena kita butuh mereka. Maka oleh karenanya kami meminta kepada Badan Riset ini untuk mencari skema.

Kemudian Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM). Kami, Fraksi Partai Gerindra meminta kepada Kepala BKIPM KKP untuk merencanakan dan meningkatkan alokasi anggaran untuk kegiatan-kegiatan aspiratif, kolaboratif, dan partisipatif bersama Anggota Komisi IV. Misalnya memperbanyak kegiatan peningkatan kapasitas pelaku usaha KP dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing yang selama ini terindikasi masih rendah.

Kemudian yang terakhir kepada Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan. Program-program strategis yang *outcome*-nya banyak dirasakan secara langsung oleh masyarakat nelayan dan pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan harus ditingkatkan volumenya volume anggarannya. Misalnya penyediaan *Coolbox*, *Ice Freezer*, kendaraan ATI, kendaraan pendingin, kegiatan Gemarikan dan peningkatan kapasitas UKM, pembangunan-pembangunan kuliner sektor KP yang melibatkan Komisi IV selaku representatif masyarakat di daerah. Kami, Fraksi Partai Gerindra meminta kepada Direktur Jenderal PDSPKP agar merencanakan alokasi anggaran maupun teknis kegiatan yang matang dan mendukung program-program strategis yang partisipatif dan berkelanjutan.

Demikian yang dapat kami sampaikan dari Fraksi Partai Gerindra. Namun kami sangat menyadari kebutuhan anggaran yang begitu besar tapi alokasi apalagi pagu indikatif kita sekitar Rp6 triliun. Maka, sesuai dengan permintaan Pak Sekjen bahwa ada penambahan anggaran sekitar Rp4,25 triliun atau Rp4.250.000.000.000,- kami, Fraksi Partai Gerindra sangat mendukung itu karena luas lautan yang luar biasa sangat tidak wajar dengan anggaran kita Rp6 triliun. Ini menjadi perhatian kami, Fraksi Partai Gerindra dan kami, Partai Gerindra mendukung usulan tambahan dari Kementerian Perikanan.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf sekali lagi atas serba kekurangan dan keterbatasan.

*Billahi Taufik Wal Hidayah.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Baik.

Terima kasih ya.

Usulan penambahan anggaran bagi kita *nggak* ada *problem* selama belanjanya memang untuk kepentingan belanja publik dan di belanja publiknya harus terarah pada produktivitas karena kebiasaan birokrasi itu mengulang yang dulu itu, hari ini, besok yang dulu, hari ini, besok yang dulu, hari ini, ukuran produktivitasnya rendah. Dan di birokrasi itu sebenarnya yang paling gampang ngambil duit itu bukan di belanja kegiatan karena belanja kegiatan itu yang nyorotnya banyak, proses tender segala macam, yang paling gampang tuh belanja rutin. Nah, di belanja rutin itu nombokinnya gampang di SPJ-in selesai, nah ini barang habis pakai. Nah, di belanja rutin sendiri saya lihat angkanya gede banget dan kita itu kan karena tidak punya otorisasi tidak bisa lihat secara detail. Contoh misalnya layanan penyiapan produk hukum ini kan Rp10 miliar ya Bu ya? Nah, Rp10 miliar itu bikin ngetik bikin SK, bikin Kepmen, Permen, PP gitu kan, itu nilainya Rp10 miliar, itu kan honorarium sebetulnya honorarium itu bisa tanda tangan-tanda tangan bagi bareng. Nah, ini titik kelemahan ini kelemahan dan bagi saya ke depan itu mari kita bersama-sama Komisi IV geser aja yang rutinnya ke arah beli kapal laut, perbaiki rumah nelayan, buat tempat pelelangan ikan yang apa namanya layak di mana-mana karena tempat lelang itu rata-rata kumuh, miskin, kumuh, miskin, masa *nggak* berubah-ubah? Nah jangan sampai biaya rutin itu mengalahkan kepentingan layanan terhadap masyarakat nanti habis di biaya birokrasi ini.

Untuk itu dipersilakan Pak Suhardi Duka dari Fraksi Demokrat dan tetap oposisi sampai hari ini. Tolong lihatin oposisinya.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Selamat pagi, dan

Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang saya hormati Pak Ketua, Pak Wakil Ketua, dan Anggota Dewan yang terhormat,

Yang saya hormati Pak Sekjen dan para pejabat Eselon I.

Kita ketahui bersama bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 itu sudah tidak berlaku lagi dan saat ini kewenangan anggaran dewan sudah penuh kembali. Dengan demikian kita setuju tidak setuju itu sangat tergantung dari apa yang disajikan oleh mitra kita.

Yang pertama, tahun 2022 kita ada aspirasi kapal 5 GT, betul Pak Zaini ya? iya. Pak Zaini tidak pernah minta-minta CPCL, mana itu kamu mau setor

kemana CPCL-nya? Ataukah bohong-bohongan aja? Iya, karena pengadaan kapal ini *ndak* pernah kami dapat ini, 2020, 2021 *ndak* ada, dianggarkan saja. Pak Zaini ini tidak bertanggung jawab terhadap anggaran yang dikelola ya. Pak Sekjennya baik banget, tapi Dirjennya bobrok banget iya. Ini terus terang tidak mampu mengelola anggaran dan tidak mampu menjaga kemitraan semuanya Dirjen Tangkap ini, jadi buat apa kita alokasikan anggaran kemudian tidak jelas. Olehnya itu, saya minta ini menjadi perhatian. Ada beberapa didalam mata Anggaran Dirjen Tangkap ini saya tidak setuju. Yang pertama server Rp5 miliar, kalau ini disetujui, saya keluar dari ruangan ini iya. Server Rp5 miliar, ini anggaran ini hanya hanya internet aja semua ini, ada Rp46 miliar, ada Rp16 miliar, ada Rp5 miliar, ya semua *online-online* saja semua, semua pengadaan-pengadaan. Ini perikanan tangkap, pengadaan semua, IT semua yang diadakan, jadi apa yang kita mau bikin ini.

Yang selanjutnya KKP minta tambahan anggaran. Yang pertama Rp2,4 triliun, kemudian minta lagi Rp2,1 triliun berapa ya, totalnya Rp4,5 triliun. Jadi saya minta ya selesaikan dulu yang Rp2,4 triliun itu, kita setuju tambahan minta penambahan anggaran Rp2,4 triliun, tapi perbaiki proposalnya supaya Menteri Keuangan menyetujui. Kalau proposalnya seperti ini IT-IT semua yang diadakan ya janganakan Menteri Keuangan, saya juga tidak setuju.

Selanjutnya PJ Gubernur kemarin Sulbar datang di Komisi IV, itu tindak lanjut dari kunjungan Pak Rohmin di Sulawesi Barat. Nah Pemprov Sulbar menyediakan kawasan untuk budidaya, saya minta ini ditanggapi oleh KKP iya, tanggapannya bagaimana terserah KKP. Yang lain saya malas menanggapi Pimpinan, Pimpinan yang lain saya malas menanggapi. Cukup ini aja.

Terima kasih.

Wallahul Muwafiq Ila Aqwamith Thariq.

KETUA RAPAT:

Sebentar dulu, tegasin. Kenapa malas menanggapi?

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Karena tidak jelas.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Tolong jelaskan ketidakjelasannya.

Cukup? Iya.

Baik.

Yang lain tidak mau menanggapi karena tidak jelas. Justru kalau tidak jelas, Bapak tidak menanggapi, birokrasi tinggal ketok, tinggal proses. Nanti saya hanya ingin minta contoh ya yang ke produk satu titik aja produk hukum, produk tersebut Rp10 miliar, nanti dalam setiap setelah selama setahun itu melahirkan berapa produk hukum. Nah, nanti satu produk hukum tuh nilainya berapa, dalam satu produk hukum tuh kalau lembaran kertas karena sekarang *nggak* mungkin musim kertas, sudah musim perangkat digital, harga perangkat digitalnya berapa itu nanti bisa ketahuan produk itu mahal atau tidak. Nah, ini ini penting bagi kita satu *item*, apalagi kalau seluruh *item*, sehingga saya ingin penambahan anggaran itu berimplikasi bagi kesejahteraan publik gitu loh.

Nah selanjutnya ini yang kritis juga. Daerah yang hari ini mengalami kemajuan yang tinggi Pak Jokowi datang ke situ kemarin hari Pancasila dan di situ ada tokoh besar namanya Edward Tanur.

F-PKB (EDWARD TANNUR, S.H.):

Selamat siang untuk kita semua.

Yang saya hormati Pimpinan beserta Anggota Komisi IV, Dirjen KKP beserta jajarannya, Singkatnya semua yang hadir dalam ruangan ini dan baik yang sekarang lagi hadir fisik maupun virtual.

Ini kesempatan yang terbaik buat kita untuk melakukan diskusi ya masukan dan tanggapan, cuma kadang-kadang tanggapan ini meleset terus. Ini yang saya juga prihatin juga.

KETUA RAPAT:

Pak Edward mohon dijelaskan yang meleset apa?

F-PKB (EDWARD TANUR, S.H.):

Yang meleset saya omong contoh tadi Pak Suhardi. Kita tidak minta 5 *Gross Tonnage* tapi tetap dikasih, ya kami istilahnya percuma *ngomong* berbuih-buih berbusa-busa aspirasi rakyat juga terakhir 1, 2 orang bisa menggagalkan ini. Maka itu Komisi IV juga perlu satu ketegasan karena apa yang kita sampaikan adalah aspirasi rakyat, tolong dihargai dan tolong diakomodir. Kami ini sudah turun di lapangan sudah *ngomong* berbusa-busa tapi ternyata semuanya palsu ini yang palsu tidak tahu siapa antara kita dengan dia atau dia dengan kita, kita tidak jelas ini. Jadi ini curhat sedikit Pak Sekjen, betapa sakitnya hati kami kalau turun ke Dapil. Tapi sudahlah itu sudah berlalu ya.

Yang kami ingin sampaikan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa sederhana-sederhana saja tapi yang *to the point* saja, yang bisa diakomodir dan bisa direalisasi. Orangnya juga sudah bosan dengar kita *ngomong*, *ngomong*, *ngomong* tapi realisasinya tidak tepat sasaran, ada yang tepat, tapi ada juga yang tidak tepat. Jadi kami menyoroti mengenai pelabuhan-

pelabuhan kita yang fasilitas dan sarananya kurang memadai, ada yang memadai tapi banyak yang kurang memadai. Misalnya fasilitas bongkar muatnya, kebersihan pelabuhan, dan izin-izin kapal-kapal yang tangkap atau yang birokrasi di pelabuhan itu semuanya belum berjalan sesuai yang kita harapkan. Itu salah satu contoh yang perlu dibenahi agar nanti kita masuk kepada tahun anggaran 2023 bisa menunjukkan satu perubahan.

Pelaksanaan di lapangan sering meleset ya, indahya berita, kabar yang kita ngomong tapi kenyataan di lapangan istilahnya “indah kabar tapi buruk rupa”. Nah kita pikir ini mulus-mulus saja, tetapi di lapangan waduh ini di luar daripada prediksi kita. Tapi okelah, ini perlu kami, Anggota DPR memberikan masukan dan menyampaikan hal-hal yang kami jumpai di lapangan.

Mengenai prioritas, prioritas yang akan dijalankan oleh KKP untuk tahun-tahun ke depan ini adalah perikanan tangkap itu perlu juga diperhatikan mengenai kualitas dan mutu kuantitas semua perlu dia perhatikan. Karena begini Pak, sekarang ini kan di sektor pertanian terjadi wabah ini kuku dan mulut, otomatis ketersediaan protein hewani pasti akan berkurang atau menurun, justru sektor perikanan ini yang kita harus genjot untuk mengatasi kekurangan protein terhadap bangsa dan negara ini, ini harus disikapi secara baik sebelum terjadi lonjakan harga atau segala macam kita harus sikapi. Apalagi sekarang musim musim iklim yang terjadi di Indonesia ini terjadi pancaroba anomali iklim, otomatis semua ketersediaan pangan akan berpengaruh besar terhadap ketersediaan yang ada di masyarakat. Dan perlu diketahui banyak anggaran-anggaran yang sekarang lagi dipotong, kami DPR saja anggaran mau ke luar negeri nih sudah dipotong. Kami mau belajar ke sana juga tidak bisa, terpaksa kita saling belajar saja di sini dari segala kekurangan yang ada.

Jadi kami intinya, kami mengharapkan agar program-program itu yang efektif dan efisien praktis harus bisa segera dieksekusi, ini yang penting. Ya terobosan mengenai budidaya ikan air tawar, kami sangat memberikan apresiasi ya karena Indonesia ini daratannya juga lumayan luas terlebih di daerah-daerah pedalaman yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Ya tahun ke tahun peningkatan sudah terlihat sekali dan banyak orang sekarang sudah sudah lebih senang makan ikan, makan ikan sehat, makan ikan kuat, makan ikan cerdas, itulah semboyan dari pada KKP ya. Kami bangga karena program-program itu sudah kami jalankan dan sasarannya sangat diterima oleh masyarakat, semoga ini bisa dilanjutkan lagi dan diperbanyak lah karena sasaran-sasaran ini sangat membantu kita dalam menyiapkan masyarakat yang cerdas. Kenapa saya harus *ngomong* begini Pak? Di NTT itu terjadi *stunting* busung lapar *stunting*, jadi program ini sangat menyentuh khususnya untuk NTT tapi umumnya seluruh Indonesia lah. Nah ini yang perlu kita beri apresiasi hal-hal ini.

Dan mengenai mengenai kualitas tadi sudah saya sampaikan, daya saing kita di luar negeri agak menurun. Jadi mari kita pikirkan bersama sebelum kita ambruk lebih baik kita pikirkan bersama, ini baru sinyal. Tapi sudah sejak dari tahun 2020 itu sudah disampaikan bahwa Indonesia mengalami krisis

kepercayaan mengenai kualitas ekspor yang lalu-lalu sudah kita bahas mengenai pengiriman lebih lebih sering lewat negara ketiga, negara kedua, kita negara pertama produksi dioper ke negara kedua *packing* dan fasilitas lebih baik baru ke negara ketiga. Berarti kita sangat dirugikan, kita punya potensi tapi pengelolaannya tidak maksimal. Ini yang kita harus pikirkan bersama kita tekankan dan Komisi IV ini adalah mitra utama daripada KKP, tolonglah kalau kami sebagai mitra tolong dihargai, sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal.

Saya kira hal-hal ini yang perlu kami Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa melihat secara garis besar dan kami memberikan apresiasi juga tentang usulan atau permohonan peningkatan anggaran untuk tahun 2023. Seperti yang lalu saya bilang, kalau modal kurang ya kita jangan berharap untuk untung besar, yang ada ya saling tipu menipu. Jadi ini baik dan kita harus pertahankan ini bahwa selain di sektor pertanian yang pasang surut, KKP Perikanan dan Kelautan ini sangat menjanjikan. Kita tahu teori ini sangat menjanjikan, tapi prakteknya di luar dari harapan.

Hari ini kami sampaikan lagi untuk kesekian kalinya sehingga menjadi atensi perhatian kita bersama. Jangan bosan-bosan KKP untuk melakukan diskusi, evaluasi, dan selalu mendengar masukan dari Komisi IV karena ini tujuan kita bersama supaya NKRI bisa lebih maju lagi.

Terima kasih banyak Pimpinan. Lebih banyak saya *highlight* secara garis besar saja karena yang lalu-lalu mengenai poin-poinnya sudah kita bicarakan bersama. Terima kasih banyak.

Selamat siang.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Rupanya dari Nusa Tenggara Timur ya cukup kalau oleh Pak Edward. Sekarang oleh Bu Julie walaupun mewakili Fraksi Nasdem, tapi pasti Dapilnya Nusa Tenggara Timur.

F-P.NASDEM (JULIE SUTRISNO):

Siap.

Terima kasih Pimpinan.

Yang saya hormati Pimpinan dengan teman-teman di Komisi IV,
Yang saya juga hormati Sekjen dengan jajarannya semua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semuanya,
Salam sehat.

Kami dari Fraksi Partai Nasdem akan menyampaikan tidak banyak hanya beberapa saja.

Yang pertama adalah Fraksi Partai Nasdem mendukung kebijakan penangkapan ikan terukur oleh KKP dengan memperhatikan hal berikut:

- Kepentingan nelayan kecil dan tradisional harus terakomodasi, dukungan dari KKP melalui Dirjen Perikanan Tangkap sangat diharapkan dengan bantuan kapal dan alat tangkap yang memadai sehingga produktivitas nelayan kecil dan tradisional mampu bersaing dalam sistem zonasi dan pengalokasian kuota;
- Pengembangan sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan yang menunjang penerapan penangkapan ikan terukur harus menjadi prioritas sehingga potensi pendapatan negara melalui produksi perikanan tangkap dapat terealisasi secara optimal;
- Pengawasan yang memadai dari KKP khususnya Ditjen PSDKP agar pelaksanaan usaha penangkapan ikan terukur dapat berjalan sesuai dengan zona dan kuota yang telah ditetapkan sehingga keberlanjutan sumber daya perikanan tetap terjaga.

Yang terakhir adalah Fraksi Partai Nasdem mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan selaku pemangku tanggung jawab produksi garam nasional berupaya mengurangi ketergantungan terhadap impor melalui peningkatan produktivitas dan perbaikan kualitas produksi garam dalam negeri, tentu saja program PUGaR dan pembangunan sarana dan prasarana niaga garam rakyat perlu terus ditingkatkan. Selain itu, kami berharap KKP melalui Ditjen Pengelolaan Ruang Laut meningkatkan dukungan teknologi pengolahan garam agar kualitas garam produksi petani dalam negeri dapat diserap untuk kebutuhan industri.

Itu saja yang sisanya aspirasi dari Nasdem kami akan lampirkan.

Sekian dan Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Terima kasih.

Geser ke Lampung, Pak Hanan mewakili Fraksi Golkar dari Lampung. Silakan.

F-PG (Ir. H. HANAN A. ROZAK, M.S.):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat pagi,

Salam sejahtera untuk kita semua.

Pimpinan dan Anggota Komisi IV yang saya hormati,
Pak Sekjen dan jajaran Eselon I yang saya hormati.

Dengan adanya dengan keterbatasan APBN anggaran yang dialokasikan ke Kementerian Pertanian eh Kementerian Kelautan dan Perikanan ini tentunya harus harus rela gitu ya bagian-bagian tertentu untuk mungkin diatur kembali terkait dengan hal-hal yang perlu kita perhatikan di 2023 untuk menyongsong tahun-tahun berikutnya seperti akan diberlakukannya penangkapan terukur, kemudian kita lihat juga pemulihan ekonomi rakyat misalnya terkait dengan kegiatan-kegiatan perikanan budidaya. Oleh karena itu, saya mengusulkan terkait dengan revitalisasi seperti saya sampaikan pada kesempatan sebelumnya, revitalisasi dan pemanfaatan optimalisasi pemanfaatan pelabuhan-pelabuhan perikanan ini perlu mendapat perhatian, kegiatan-kegiatan lain mungkin program yang lain harus rela untuk diturunkan mungkin anggarannya yang diperhatikan yang kaitan revitalisasi pelabuhan. Karena apa? Manakala di implementasikan penangkapan ikan terukur itu tentunya ini sangat penting ya persiapan daripada pelabuhan.

Kaitan-kaitan yang berdampak langsung terhadap masyarakat seperti yang diusulkan teman-teman saya kira saya sependapat, bantuan-bantuan yang bisa menyentuh langsung masyarakat nelayan kecil kita apalagi kita di saat ini sampai 2023 mungkin masih terdampak akibat Covid itu ke ekonomi kerakyatan. Tadi ada usulan-usulan yang kapal-kapal dengan GT yang ya 5GT ke atas itu ya kalau bisa yang tadi kapal-kapal apa alat-alat tangkap yang memungkinkan dengan untuk nelayan kecil itu diperhatikan.

Kemudian yang kedua, peranan daripada perikanan budidaya saya kira ini perlu mendapat perhatian juga secara khusus bahkan lebih banyak lagi di 2023. Masalahnya adalah di budidaya khususnya budidaya yang berbasis kearifan lokal adalah terkait penyediaan benih atau bibit ya, nah ini terkendalanya apa? terkendala dengan sumber-sumber bibit, sumber-sumber benih, penangkar-penangkar bibit perikanan untuk yang ditangkarkan oleh rakyat itu sekarang ini sangat terbatas, kemudian juga Balai Besar pembibitan juga belum dapat kita siapkan dengan baik. Oleh karena itu, ya kalau dimungkinkan ini Pak Dirjen ya setiap Provinsi punya lah Balai Besar itu ya untuk pendampingan ke masyarakat pembudidaya maupun penyiapan benih-benih yang apa namanya yang baik yang unggul. Contohnya saja tahun 2022 ini Bioflok sudah digelar, ini respon respon masyarakat sangat luar biasa, ini saya sampaikan Pak di Dapil saya ada satu bioflok kita kumpulkan ternyata yang lain sudah mulai secara swadaya membuat karena mau lihat apa yang dicontohkan. Artinya apa? Ini sangat sangat baik ya untuk perikanan budidaya. Namun balai budidaya ini ini perlu diperhatikan.

Khusus untuk Lampung, Pak Dirjen pernah koordinasi ke Pemprov akan mendirikan Balai Besar air tawar Pak ya, Balai Besar Benih. Balai Benih Ikan ya di Mesuji itu, saya sudah cek ke Pak Bupatiya itulah sekarang PD itu mereka siap Pak untuk segera menyiapkan lahan itu ke ke Kementerian Kelautan. Saya kira bisa disegerakan itu supaya kita menyongsong kegiatan-

kegiatan bioflok, pengembangan bioflok, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang memerlukan apa namanya dukungan dari Balai Benih.

Kemudian terkait dengan tadi ada disinggung oleh Pak Suhardi Duka terkait dengan *server*, Pak ini tolong hati-hati Pak ya karena saat ini sudah ada Moratorium kalau tidak salah saya pernah dengar terkait dengan pengadaan *server*. Jadi semua yang kaitan-kaitan dengan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) itu sudah tersentralisir di Kominfo Pak, Kementerian Komunikasi dan Informatika, berapapun kebutuhan apa namanya *server* itu ditampung di sana, Pak. Ini tolong koordinasi antara Kementerian Kelautan dengan Kominfo, ada Moratorium yang tidak membolehkan lagi kita untuk pengadaan-pengadaan itu karena mereka sudah siapkan itu Pak ya.

Saya kira ini tambahan dari saya.

Saya akhiri.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (H. DEDI MULYADI, S.H./WAKIL KETUA KOMISI IV):

Baik. Terima kasih.

Dari Lampung kita geser ke Maluku, Bu Saadiah Uluputty. Maluku kan?
Oh iya.

F-PKS (SAADIAH ULUPUTTY, S.T.):

Iya.

Terima kasih Pak Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat siang,
Salam sejahtera bagi kita sekalian.

Pak Sekjen, para Dirjen, dan jajaran yang saya hormati,
Pimpinan dan Anggota Komisi IV.

Mendalami lanjutan pembahasan APBN 2023 di Kementerian KKP, saya akan meng-*highlight* beberapa catatan Pak Sekjen, sebagian besarnya saya akan sampaikan secara tertulis untuk dijawab secara tertulis.

Pembahasan APBN ini merupakan satu instrumen ya untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pembangunan dalam mencapai beberapa tujuan-tujuan tertentu: pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, menciptakan stabilitas perekonomian, dan yang lebih penting adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saya ingin mengingatkan kita

semua bahwa salah satu kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan sebagai salah satu sebagai Kementerian yang mengurus Kelautan dan Perikanan harusnya, saya mengingatkan kembali Pak Ketua soal janji Presiden yang saya sering sebutkan di ruangan Komisi ini soal Lumbung Ikan Nasional.

Hari ini saya mengapresiasi Pak Sekjen telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp1 triliun, 2 ya Pak Sekjen ya, Rp2 triliun dalam pembangunan Maluku Lumbung Ikan Nasional begitu. Tetapi saya agak keberatan Pak Sekjen, jika kemudian dia masuk di dalam anggaran tambahan begitu, apakah ada jaminannya dengan mengusulkan Rp2 triliun dalam pagu anggaran tambahan ini dia terakomodir nanti pada anggaran 2023? Jika kemudian diusulkan dalam anggaran tambahan, saya *kok* merasa seperti disepelekan lah begitu. Kenapa tidak masuk di dalam anggaran murni yang diusulkan sekarang begitu, nanti ada bagian-bagiannya yang diusulkan dalam anggaran tambahan begitu, karena ini soal janji Presiden, yang pertama. Yang kedua, kalau bicara tentang pendapatan Maluku itu memberi kontribusi yang besar 37% untuk sektor tangkap dan wajar begitu, akan adil jika kemudian mendahulukan alokasi anggaran untuk MLIN ini. Ini *stretching* saya untuk MLIN Pak Sekjen jadi ini catatan, jika kemudian tidak masuk, waduh saya akan keluar dari ruangan ini Pak Ketua sebagai satu *statement* politik. Dan saya senang tadi Pak Ketua menyampaikan Tatib MPR bahwa tugas dan tanggung jawab kita di sini sebagai Anggota DPR adalah mengawal aspirasi masyarakat.

Yang kedua yang ditunggu-tunggu dan sering diharapkan oleh masyarakat nelayan kita dan terutama nelayan pelaku-pelaku utama nelayan kita adalah bantuan-bantuan langsung, alat tangkap mau itu 5GT, pancing tonda, jaring bobong, rumpung, ketinting dan lain-lain yang harusnya dialokasikan pada mata anggaran di Dirjen Tangkap. Saya ingin mendapatkan ada penjelasannya karena terus terang sudah setahun kita di Komisi IV ini saya *kok* sebagai orang yang berasal dari Dapil yang punya laut yang luas, kemudian juga nelayan terbanyak, tetapi advokasi bantuan-bantuan untuk nelayan tidak ada, hampir tidak ada. Kami itu ketika turun ke masyarakat lalu masyarakat menyampaikan aspirasi dan proposal yang menumpuk tidak tahu harus menyampaikannya ke mana, beda ketika misalnya kita dengan Kementerian Pertanian banyak sekali bantuan-bantuan Alsintan dan lain-lain sebagainya yang bisa untuk mengadvokasi dan juga menjawab persoalan masyarakat petani kita. Olehnya itu, saya minta ada kepastiannya untuk 2023.

Yang ketiga, Pak Ketua soal tenaga penyuluh begitu. Ini tenaga penyuluh dan tenaga honorer kita ini kita sering sampaikan di sini dan juga saya ingat masuk di dalam rekomendasi Panja Sarpras Perikanan, kita dorong agar baik secara kuantitas maupun kualitas dia dialokasikan anggaran untuk memperbanyak tenaga penyuluh kita. Pak Sekjen, misalnya ya saya ambil contoh di Maluku luas lautannya 93% dari teritori luas Maluku, tetapi tenaga penyuluh perikanan kita tidak sampai 100 orang. Tenaga Penyuluh perikanan Pertanian sudah 500 orang, sementara tenaga penyuluh perikanan tidak sampai 100 orang dan bahkan untuk berbasis kecamatan saja dia tidak memenuhi persyaratan begitu.

Lalu untuk yang keempat. Menyambut tahun 2023 nanti ada penerapan atau implementasi kebijakan penangkapan terukur. Bukan tidak setuju sebenarnya, selalu kami sampaikan kita duduk bicara soal bagaimana kehadiran Kementerian ini untuk mentransformasikan masyarakat kita dan terutama sebagaimana tadi yang disampaikan pada saat pembacaan pengantar pidato rapat tadi bahwa kita harapkan adanya kesejahteraan dan kemudian keadilan bagi nelayan-nelayan kecil kita begitu. Makanya di wilayah beberapa wilayah WPP yang akan dijadikan sebagai daerah-daerah, zona-zona penangkapan terukur, kami harapkan ada juga alokasi anggaran untuk revitalisasi dermaga Pak Sekjen. Saya sudah sampaikan di sini beberapa waktu kemarin bahwa misalnya saya ambil contoh WPP 718 di Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, kan aneh begitu lucu kalau di sana tidak ada dermaga pemerintah, pemerintah pusat maksud saya, yang ada hanya dermaga pemerintah Kabupaten dan Provinsi. Padahal WPP 718 itu sudah saya sebutkan WPP paling, paling seksi paling berperan penting untuk penangkapan ikan, eksplorasi ikan, dan eksploitasi ikan di sana memberikan kontribusi yang besar tapi kenapa belum ada pembangunan dermaga-dermaga pusat di sana ataupun kalau ada dermaga Provinsi *mbok ya* diperbaiki, ditata ulang revitalisasikan kembali agar terintegrasi dengan baik itu kebijakan penangkapan terukur ataupun adanya peningkatan sumber apa namanya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi baru dan juga usaha-usaha masyarakat yang bisa dikembangkan.

Yang terakhir, Pak Ketua. Saya mengingatkan kita semua bahwa hendaknya jika ada kunjungan dari Pak Menteri ke daerah bersama para Dirjen, semua janji-janji yang sudah disampaikan ke masyarakat harap menjadi catatan dan bisa diakomodir begitu. Kami ketika menemani Pak Menteri ke daerah, kami lah yang menjadi jaminannya Pak Ketua, dan salah satunya yang saya ingatkan Pak Zaini dan Pak TB mungkin pada saat kita ke Tual pertama dengan Pak Menteri itu beliau berjanji akan memberikan bantuan kepada koperasi ikan teri di Tual, Pak Menteri menjanjikan ada dua bantuan yang akan diberikan dijanjikan akan diakomodir di 2022 kemarin, tapi karena sudah terlambat kita saya mengusulkan agar juga diakomodir di 2023.

Terima kasih Pak Ketua saya kembalikan.

Wabillahi Taufiq Wal Hidayah.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik.

Terima kasih ya.

Bicara persoalan nelayan, bicara persoalan yang tidak pernah selesai. Laut luas, ikan banyak, dicuri orang, dicuri negara lain, perangkat kita terbatas lemah, penegakan hukumnya lambat, penyelundupannya tidak pernah selesai-selesai. Padahal yang jaga laut banyak banget dari Kementerian Kelautan,

Angkatan Laut, Patroli, terus kemudian Kepolisian yang bidang Kelautan, Bakamla, banyak banget yang dijaganya tetapi penyelundupan terus berlanjut tidak pernah berhenti sampai hari ini. Ini *problem*, nelayan kita dihadapkan oleh lemahnya modal, infrastruktur tempat pelelangan ikan yang buruk, dermaga yang terbatas, infrastruktur jaringan jalan darat menuju tempat pelelangan ikan rata-rata buruk di berbagai tempat, kemudian pendidikan nelayan yang rendah, tingkat sanitasi lingkungannya rendah, kesehatan pelayanan kesehatan juga rendah. Ini *problem* yang harus segera diselesaikan dan jawaban *problem* ini adalah perencanaan anggaran yang terukur dari waktu ke waktu, diberesin satu tempat geser ke tempat lain, geser ke tempat lain, geser tempat lain. Kalau polanya seperti ini sampai kiamat *nggak* akan beres urusan kelautan, nah ini *problem* kita yang harus segera diselesaikan.

Nah selanjutnya kita geser ke pengelola daerah Patimban, Mayangan, Eretan, Blanakan, ini Pak Sutrisno dari Majalengka yang tidak punya laut.

Silakan.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan, Pak Sekjen beserta Pak Eselon I Kementerian Perikanan,

Dalam menyikapi rencana belanja Eselon I dan terkait juga rencana Kementerian KKP mengusulkan tambahan pagu indikatif Rp4,25 triliun, izinkan saya kembali ya untuk mengkaji tentang landasan lahirnya apa namanya anggaran-anggaran belanja tiap Eselon I.

Saya menyikapi pagu indikatif Rp6,1 triliun, Pak Sekjen. Baru pertama kali Kementerian Kelautan dan Perikanan ya pagu indikatifnya berimbang dengan pagu indikatif Kementerian apa namanya LHK, sama-sama *enam koma sekian* hanya beda sedikit, ini luar biasa, tapi terbangun pada diri saya jangan-jangan ini karena terjadi peningkatan PNBP. Oleh karena itu, saya mencoba melihat dari mana nih *enam koma satu* ini, *enam koma satu* ini sumbernya dari mana. Ini sumbernya dari Rupiah Murni 5,83 triliun, kemudian pinjaman hibah Rp76,15 miliar, nah PNBP yang diandalkan untuk meningkatkan *enam koma satu* ternyata hanya Rp138,19 miliar, kemudian PNBP dari BLU Rp59,67 miliar. Oleh karena itu, kemarin terungkap pada saat Rapat dengan Menteri LHK itu ditanya oleh rekan-rekan Anggota, berapa persen sesungguhnya Menteri Keuangan mengalokasikan bagian pendapatan dari PNBP kepada Kementerian penerima PNBP? Lapornya katanya 20%, saya juga tidak tahu apa itu yang terbangun kemarin pada waktu rapat dengan Kementerian LHK.

Nah oleh karena itu, oleh karena itu saya ingin mendapatkan penegasan mendapatkan penegasan, saya dapat data yang dibuat oleh Dirjen Tangkap pada tahun 2022 pada saat pembahasan dengan Banggar dan Menteri

Keuangan bahwa target capaian PNBP tahun 2023 adalah Rp7,55 triliun. Kalau benar, kalau benar bahwa bagian dari pada lembaga penerima PNBP itu 20% mestinya di dalam pagu indikatif yang bersumber dari PNBP itu bukan apa namanya *seratus tiga puluh delapan koma sekian miliar* tapi Rp1,5 triliun, ini data yang harus pasti di diperdebatkan dulu. Kemudian sumber PNBP dari BLU, pertanyaan saya adalah yang dari BLU itu apakah dalam bentuk bunga? Apakah itu dalam bentuk bunga?

Kemudian yang kedua, yang kedua. Bicara APBN kan pendapatannya dari mana dan untuk apa, saya mencoba mengkaji dari soal apa namanya belanja atau pengeluaran. *Enam koma satu* ini dari sisi program itu yang akan menghasilkan produksi di sektor Kelautan dan Perikanan hanya Rp2 triliun yaitu program pengelolaan perikanan dan kelautan sebesar Rp2 triliun, anggaran-anggaran lainnya adalah anggaran-anggaran pendukung itu anggaran pendukung. Kemudian dari Rp2 triliun itu, itu yang terbesar adalah dari Badan Riset dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebesar Rp1,34 triliun. Lembaga atau Direktorat yang akan menghasilkan hasil untuk mencapai target capaian itu hanya apa nama di bawah *satu koma tiga empat*, sedangkan unsur riset, kemudian peningkatan sumber daya manusia, itu kan pendukungnya. Nah manakala yang memproduksinya pun juga anggarannya tidak cukup, pertanyaannya adalah akankah target capaian itu bisa tercapai?

Di sini tadi Pak apa namanya sekjen juga menyampaikan bahwa dari Rp6,1 triliun itu ingin mencapai pertumbuhan 4 sampai 6 poin di sektor Kelautan dan Perikanan, kemudian produksinya 30 juta ton lebih, kemudian apa namanya eksponya 7,66 apa namanya miliar. Akankah itu bisa dicapai manakala yang memproduksinya tidak ada anggarannya? Artinya apa? Apa yang dihasilkan itu adalah bukan karena sentuhan anggaran ini. Oleh karena itu, manakala ingin mencapai apa yang ditargetkan ya tentunya perlu dikaji kembali itu kan, anggaran-anggaran itu penjabaran-penjabaran itu belanjanya, alokasi anggarannya tidak dari tahun kemarin bagi-bagi anggaran tentu ini sangat tergantung mau kemana tahun 2023 anggaran KKP ini dalam rangka mencapai apa yang telah disepakati bersama. Termasuk dalam peningkatan nilai tukar nelayan 107 itu, sedangkan program-program yang dialokasikan ke sana yang menyentuh bagi kehidupan nelayan tidak ada sebagaimana tadi disampaikan oleh rekan kita dari PKS.

Kemudian yang ketiga, yang berikutnya Pak Sekjen. Anggaran yang mencapai yang bersentuhan dengan masyarakat nelayan yang tentunya yang bekerja bagaimana mencari kehidupan, bagaimana meningkatkan produksi itu hanya dalam bentuk bantuan Bioflok, kemudian benih, kemudian apa namanya mesin pakan ya, kemudian juga alat tangkap yang hanya 1.000 unit, sedangkan wilayahnya kita sangat luas. Mereka-mereka itulah yang anak menghasilkan apa namanya produksi untuk mencapai tujuan ekspor untuk meningkatkan apa nilai tukar nelayan, bagaimana mungkin manakala anggaran yang Rp6,1 triliun anggaran untuk yang bersentuhan dengan masyarakat itu hanya sebesar itu. Sedangkan program nasional pemerintah untuk tahun 2023 salah satunya adalah untuk menghapus kemiskinan ekstrim, itu ada di nelayan, itu ada di sektor pertanian.

Nah, oleh karena itu, ya kami dari dari Fraksi PDI Perjuangan tentunya perlu dikaji kembali nih ya perlu dikaji kembali anggaran-anggaran yang tentunya dialirkan sebanyak-banyaknya bagaimana merubah kehidupan rakyat kita itu bisa berubah. Karena hakekatnya anggaran ini kan bagaimana menjaga wilayah Negara Kesatuan ini ya, kemudian isinya diberdayakan untuk masyarakat, masyarakat meningkatkan kehidupannya, keuangan negara kuat, kemudian devisa kita juga kuat ini. Manakala itu dilakukan tentunya apa yang tadi digariskan, apa yang direncanakan pasti bisa tercapai.

Kemudian fakta, fakta nih Pak, saya coba dari rencana anggaran yang dibuat nih mohon maaf saya hanya buka dari Dirjen apa namanya Budidaya. Dirjen Budidaya ini di halaman 8 ini Pak halaman 8 ya itu ya, kok ada anggaran tahun 2022 yang direncanakan dibiayai di tahun 2023, yaitu pembangunan Kampung Perikanan Budidaya, kampung budidaya tahun 2022, kampung budidaya tahun 2023 itu. Pertanyaan saya, apakah apa namanya kegiatan ini *multiyears* ya tahunnya panjang bukan selama tahun anggaran? Kok ada tahun 2022 dianggarkan di tahun 2023? Kemudian yang lainnya yang lainnya yang lainnya tetap masih di apa namanya Tangkap, pada rapat yang lalu Komisi IV mensikapi rencana pembangunan kawasan pengembangan udang di Kebumen, gitu kan.

Sekarang ada program di halaman 7 itu program kelanjutan PUBK Kebumen itu Rp30 miliar, kemudian perusahaan tambak udangnya juga Rp30 miliar, ini juga mencerminkan apakah program itu juga *multiyears*? Nah dari halaman 7 ini, halaman 7 ini. Pertanyaan berikutnya adalah siapa nanti pelakunya untuk mengembangkan usaha apa nama pengembangan udang, pengembangan apa nama lobster, dan pengembangan juga rajungan atau kepiting? Ini bukan rakyat kecil ya, apakah akan dikelola sendiri oleh Kementerian atau siapa mitranya? Pencerminan program ini tidak apa namanya berkorelasi peduli pada masyarakat kita, ini adalah kelompok-kelompok yang akan bisa menggunakan itu adalah pengusaha-pengusaha besar. Oleh karena itu, mohon dijawab dengan dengan seksama, ini nantinya siapa yang akan mengelola apa namanya program ini dengan anggaran yang begitu luar biasa? Dalam kondisi anggaran yang terbatas saja itu teralokasikan Rp363 miliar untuk sektor itu, sedangkan rakyat kecil tidak teralokasikan anggarannya.

Oleh karena itu, Pimpinan ya untuk Fraksi PDIP Perjuangan karena konteks pembahasan ini kami tidak akan mengambil sikap bahwa usulnya adalah untuk dikaji kembali, didalami kembali karena banyak data-data, banyak rencana ini yang masih perlu diperbaiki. Termasuk tadi apa namanya PNBP, termasuk rencana rencana anggaran ini karena kepentingan rakyat nelayan juga tidak tersentuh.

Itu saja dari kami.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik.

Terima kasih Pak Sutrisno yang telah memberikan catatan kritis perbandingan bumi dan langit anggaran, yang satu beratus-ratus, bertriliun-triliun, yang satu peruluh-puluh, itu pun kadang-kadang ada yang tidak terealisasikan.

Nah selanjutnya apakah Bapak Syafrudin masih akan bicara atau sudah cukup? Cukup? Aman. Sudah Pak Syafrudin, Nusa Tenggara Barat sudah aman, sudah aman, sudah cukup. Jangan diwakili oleh Bapak Pak, walaupun satu Nusa Tenggara beda Pak, mazhabnya beda.

Selanjutnya dipersilakan seluruh Pejabat Eselon I untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Dan yang paling penting itu sebenarnya bagi saya itu bukan jawaban, yang paling penting adalah mau *nggak* melakukan perubahan-perubahan terhadap struktur anggaran yang ada yang dianggap tidak memiliki relevansi dengan kesejahteraan publik diganti menjadi orientasi program yang memiliki relevansi dengan kesejahteraan publik. Karena saya selalu perhatikan di DPR ini kaya cerdas cermat, tanya, jawab, tanya, jawab, dan simpulkan. Nah ini jangan saya *nggak* mau lah tanya, jawab, simpulkan. Pertanyaannya adalah jawabannya mau *nggak* melakukan perubahan-perubahan dari seluruh perubahan-perubahan itu kalau ada efisiensi seluruh belanja yang tidak penting mau diarahkan ke mana, targetnya apa, wilayahnya mana? Kita ingin dalam waktu kedepan seiring dengan perubahan tol, perubahan bandara, perubahan pelabuhan, saya juga melihat pengen ada perubahan-perubahan di tempat pelelangan ikan, tempat pelabuhan ikan, jalan menuju pasar ikan, kemudian kapal-kapal ikan, nelayan, perumahan ikan, itu yang difokuskan. Kalau itu yang difokuskan, nelayan sejahtera, KKP berjaya.

Terima kasih.

SEKJEN KKP (Drs. ANTAM NOVAMBAR, S.H., M.Hum):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang terhormat Pak Ketua, Wakil Ketua, para Anggota, Bapak/Ibu Komisi IV DPR RI.

Kami akan mencoba bukan menjawab, tapi kayaknya masukan terus kami rubah.

Yang pertama-tama kami mencoba sebetulnya awal ini kan masih awal, kami minta tayangkan untuk yang ini rencana bantuan yang langsung menyentuh ke masyarakat, nanti kita lihat lagi mungkin tadi ada beberapa anggaran yang mungkin yang apa tidak tidak berpihak kepada rakyat kan yang minta dirubah.

KETUA RAPAT:

Sebentar, Pak Sekjen.

Ini saya nawarin *deh* kepada para Ketua Poksi ya. Pembicaraan pada sebuah ruang besar seperti ini dengan alur penjelasan yang sangat jauh, seringkali identifikasi pikiran kita tidak menjadi tepat. Saya lebih cenderung begini *deh*, ini ada waktu nih kita sampai jam 1. Bagaimana kalau para Kapoksi bertemu di ruangan Pimpinan, kita bahas detil bareng?

ANGGOTA KOMISI IV:

Setuju, Pak.

KETUA RAPAT (H. DEDI MULYADI, S.H./WAKIL KETUA KOMISI IV):

Ya. Bahas detil bareng dibanding kayak tanya jawab begini *nggak* pernah *clear*. Nah kita sampaikan ini perubahan yang harus dilakukan ini *loh*, alokasinya ini, arahnya ke sini, teman-teman ini keinginannya seperti ini, di daerah pemilihannya ini *loh* ingin ada sesuatu perubahan besar. Ketika misalnya Pak Trisno menjadi Anggota DPR di Mayangan itu jadi begini *loh*, ini jasa bagi publik gitu loh. Saya ingin begitu agar kita melahirkan sesuatu yang komprehensif.

Saya tawarin ke teman-teman, setuju *nggak?* setuju *nggak?* Ya bagaimana silakan.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M):

Begini Pak Ketua.

Terima kasih Pak Ketua atas kesempatannya.

Tadi kan pertanyaan-pertanyaan Anggota itu memang perlu dijawab ya, tetapi saya mencermati pertanyaan Anggota itu lebih kepada jawaban konkret dari Kementerian. Jadi menurut saya, ini kan lebih spesifik ada pembahasan yang harus apa detil dan harus disepakati bersama. Saya pikir ini memang ada perlu ada pembahasan lebih lanjut iya kan, apakah nanti di skors dulu atau gimana yang penting ini adalah basis anggaran untuk berbasis sosial ini sangat penting untuk kita ya untuk masyarakat secara umum gitu.

Demikian, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Baik.

Terima kasih.

Kita percepat saja, kita waktu skors sampai pukul 13.00 WIB untuk melakukan pembahasan di internal.

F-P.GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI DESS, M.Sc):

Pak Ketua, usul.

Perlu ditandatangani oleh semua Dirjen, karena kalau tidak, tadi, tidak ada aplikasinya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Dalam hasil pembahasannya ditandatangani semua Dirjen. Sampai pukul 13.00 WIB ya, setuju *nggak*? Ya.

Terima kasih.

**(RAPAT: SETUJU)
(RAPAT DISKORS PUKUL 12.07 WIB)**

(RAPAT DIBUKA PUKUL 13.15 WIB)

KETUA RAPAT (H. DEDI MULYADI, S.H./WAKIL KETUA KOMISI IV):

Kita sudah melakukan pembicaraan internal antara Pimpinan Kapoksi dengan jajaran Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh Sekretaris Jenderal. Dan untuk itu yang pertama yang menjadi fokus kita bahwa kita menyepakati prioritas anggaran diarahkan pada kepentingan yang bersifat publik, *infrastructure* kepentingan dunia perikanan Indonesia, baik perikanan laut, perikanan air tawar, perikanan air sungai lainnya, ini yang fokus kita.

Kemudian yang kedua, Kementerian Kelautan sanggup untuk melakukan evaluasi terhadap berbagai nomenklatur anggaran yang dianggap tidak memiliki implikasi yang besar bagi kepentingan publik secara langsung.

Kemudian yang ketiga, Kementerian Kelautan tidak akan lagi mengulangi berbagai kegiatan:

1. bertentangan dengan kepentingan publik;
2. bertentangan dengan aspirasi para Anggota DPR; kemudian
3. bertentangan dengan prinsip-prinsip anggaran yang harus berorientasi pada *output* dan *outcome* pengelolaan anggaran.

Jadi fokusnya kita rubah bahwa bukan anggaran belanja yang menjadi fokus, karena kalau anggaran belanja yang menjadi fokus pikiran kita, pikiran pemerintah dari pusat sampai daerah ditekan banyaknya belanja. Bagi saya, *nggak* penting banyaknya belanja kalau belanjanya *nggak* tepat sasaran, kan rugi negara. Yang dievaluasi sekian persen-sekian persen, tapi dampaknya tidak ada untuk kepentingan masyarakat, tapi kita arahkan sebesar-besarnya belanja ini yang memiliki *benefit* bagi kepentingan publik.

Dan saya pesan satu juga ada dua kali Raker udah 2 tahun ini mewakili masyarakat Jawa Barat dan mewakili juga masyarakat nelayan Pangandaran, agar kapal *illegal fishing* yang waktu itu tergeletak di areal bibir Pantai Pangandaran segera ditarik ke pinggir, dikerjasamakan dengan pemerintah setempat untuk dibuat sebagai tempat wisata dan kalau butuh tanah segala macam nanti dikomunikasikan dengan Pemda Pangandaran. Saya pikir Bupatinya juga akan menyiapkan, dibanding kapal itu bertahun-tahun ada di pinggir laut, kemudian dalam posisi terbalik. Nah, kalau butuh biaya misalnya 500 kan bisa kerjasama dengan Angkatan Laut kalau memang tidak ada APBD-nya APBN-nya. Nah ini ini fokus fokusnya.

Untuk itu Pak Sekjen silakan jawab, tidak usah per Dirjen satu-satu silakan jawab global. Kesanggupan untuk melakukan perubahan terhadap berbagai otokritik dan aspirasi yang dilakukan oleh teman-teman Anggota Komisi IV.

Terima kasih.

SEKJEN KKP (Drs. ANTAM NOVAMBAR, S.H., M.Hum):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih atas waktunya.

Sesuai dengan yang ditanyakan, kami mencoba menjawab secara global bahwasanya aspirasi rakyat akan kami utamakan. Jadi program kami yang sebelumnya memang sebetulnya untuk kepentingan rakyat seluruhnya, tapi ternyata setelah disisir ada yang lebih penting lagi, nah itu yang kita apa akan kami laksanakan. Besok kami sampaikan hasil sisir kami, semoga semuanya bisa lebih fokus dalam penggunaan anggaran ini demi kepentingan rakyat terutama kepentingan nelayan dan masyarakat pesisir. Juga beberapa teguran, saran, terutama teguran yang tidak boleh terjadi lagi kami akan upayakan dan kami berjanji tidak akan mengulangi lagi anggaran penggunaan anggaran yang tidak fokus dan tidak mengena kepada rakyat, juga besaran atau ukuran apapun harus sama dengan speknya, harus sama bisa dipergunakan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

Mungkin itu yang kami sampaikan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Sekjen.

Masih ada perlu pendalaman *nggak* sih? Nggak perlu ya. Secara esensi kan sudah diakomodir dan kemudian nanti di sebelum Raker kan disampaikan pada kita ada perubahan atau tidak, kalau tidak perubahan ya Rakernya nanti kita tolak ya.

Baik, terima kasih. Kesimpulan.

F-PD (BAMBANG PURWANTO, S.ST., M.H.):

Ketua, Ketua. Izin, izin.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T):

Sedikit, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T):

Silakan Pak Bambang.

F-PD (BAMBANG PURWANTO, S.ST., M.H.):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan dan rekan-rekan Anggota yang saya hormati,
Pak Sekjen beserta jajarannya yang saya hormati pula.

Saya ini memang mulut saya ini sudah terjual di di lapangan terhadap masyarakat di sana, karena saya meyakini apa yang diprogramkan oleh KKP ini saya sampaikan ke masyarakat, baik itu pembudidaya ikan maupun nelayan. Nah, kalau saya melihat dari visi misi yang ada di KKP intinya adalah kesejahteraan baik itu pembudidaya maupun nelayan, tetapi fakta di pusat anggaran tadi di dalam oleh teman-teman memang betul itu tidak menuju ke pencapaian visi misi tersebut.

Kemudian fakta di lapangan, Pak Menteri menyampaikan bahwa prioritasnya adalah, salah satu prioritasnya adalah pembudidaya ikan. Tetapi tahun pertama saya mendapatkan aspirasi 1 juta ekor, tapi tahun pertama saya tidak pernah menerima itu. Ini mohon dicatat.

Kemudian tahun kedua hanya dapat 480 sehingga para pembudidaya ini menganggap saya ini hanya janji-janji kosong, padahal kami yang mendapat aspirasi kami bina di lapangan, kami monitor setiap saat saya pulang. Sebenarnya ini juga sudah membantu KKP mestinya.

Kemudian kualitas Bioflok mulai menurun, ini saya ingatkan agar kedepan itu diperbaiki.

Kemudian pakan ikan. Kemarin rencana saya itu dapat 5 itu saya bentuk kelompok, tapi juknisnya tidak memungkinkan untuk itu, nah ini kan jadi kecemburuan kelompok-kelompok yang lain. Maksud saya tadinya mau saya

pergilir, anggotanya perwakilan dari kelompok-kelompok itu ini lebih efisien, tapi juknis di KKP juga tidak mungkin untuk itu.

Kemudian nelayan. Pernah ada aspirasi 180 *pieces*, sampai sekarang juga belum ada.

Kemudian Kapal 5 GT yang rencananya mau diluncurkan tahun ini ternyata ini juga sampai sekarang belum ada. Lantas yang menjadi pertanyaan, seperti apa komitmen KKP ini untuk membantu baik itu nelayan air tawar maupun laut? Karena ini rata-rata mereka kehidupannya menengah ke bawah, kapan mereka bisa sejahtera kalau *nggak* kita bantu? sesuai visi misi KKP.

Kemudian ada permintaan nelayan juga yang sesuai dengan keinginan mereka minta kapal mereka yang sudah buruk itu dilapis pakai *fiber* dari tengah ke bawah, karena mereka tidak pernah mendapatkan fasilitas baik itu kapal maupun jaring. Nah ini perlu menjadi perhatian, kapan mereka bisa bangkit nelayan-nelayan itu kalau tidak mendapatkan perhatian serius dari KKP? Dan yang lebih penting, saya ini cukup malu karena sudah kami sampaikan ke masyarakat kemudian barangnya *nggak* ada. Lebih parah lagi bibit ikan itu hanya mengandalkan dari Mandiangin, sedangkan Mandiangin itu harus memenuhi bibit seluruh pulau Kalimantan. Ini *nggak* bisa dibayangkan ini, kenapa hal ini tidak diperbaiki untuk menuju pencapaian visi misi. Kalau modelnya seperti ini sampai kapanpun tidak akan bisa tercapai visi misi itu. Tadi sudah disepakati oleh teman-teman Kapoksi, nah ini supaya ini diperbaiki Pak Sekjen. Saya yakin teman-teman ini yang dari birokrat sudah berpengalaman cuma beliau-beliau ini mungkin takut. Kalau diserahkan penuh kepada teman-teman di birokrat, saya yakin sudah menguasai betul. Nah, ini perlu dibangkitkan kembali teman-teman yang asli birokrat, saya yakin dan percaya beliau-beliau ini pasti menguasai sebenarnya.

Saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Kami akan tunggu jangan sampai tahun ini meleset, kalau tahun ini meleset kami akan gunakan sistem pengawasan kami.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik.

Terima kasih Pak Bambang.

Apa yang disampaikan tadi sudah menjadi bahasan detail dan komprehensif, termasuk pelaksanaan kegiatan Bioflok itu nanti akan itu sekarang sistemnya *e-catalogue* dan seluruh detail kelengkapannya nanti harus diumumkan diberitahukan pada seluruh anggota. Termasuk mengakomodir para peternak lokal yang menyediakan bibit dan menyediakan anakan, itu juga harus menjadi fokus perhatian harus dihindarkan lagi satu

penyelenggara kegiatan pemenang tender kegiatan mengirim ikan dengan jarak yang jauh, ini harus dihindarkan. Karena hakekatnya seluruh kegiatan ekonomi yang bersifat aspiratif itu adalah membangkitkan ekonomi pedesaan yang di situ terjadi perputaran uang secara otonom seperti itu.

Selanjutnya Pak Johan. Silakan.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pak Ketua yang saya hormati dan Anggota,
Pak Dirjen, Pak Sekjen, seluruh Eselon I di Kementerian KKP.

Pertama Pak Ketua, saya bukan tidak percaya dengan Bapak, saya *tuh* orang sangat percaya dengan di Rapat Pimpinan itu karena itu kita usulkan seperti itu. Cuma karena kita tidak diberikan gambarannya itu kayak apa, ya biasanya kapoksi saya langsung kirim cuma dikirim cuma data PNBPN saja tadi, yang lain belum iya kan. Kalau bahasanya Pak Ketua tadi kan masih bahasanya GBHN iya kan bahwa kita akan begini, bahwa kita akan perbaiki begini, begini, begini. Sementara indikator utama ya indikator utama yang dibuat oleh KKP ini Pak Ketua, kesejahteraan nelayan kita itu sudah tergambar di akhir 2023 angkanya 107 Pak, NTN-nya, itu luar biasa. Kementerian Pertanian saja *nggak* berani sampai 105 aja *nggak* berani, 104 pun mikir dia, 103 aja beraninya dia. Tapi KKP Pak 107, nah ini kan kita sudah membayangkan bahwa kita kemudian punya nilai daya saing perikanan yang bagus, hasil tangkap ikan kita luar biasa, alat tangkap tidak lagi menjadi persoalan, penataan-penataan prinsip yang sudah tidak jadi masalah, tapi kan ini tidak.

Mari kita lihat postur anggarannya, dari Rp6 triliun diajukan Pak Ketua, itu di 51%-nya dukungan manajemen. Untuk programnya saja cuma 1,6, bahkan untuk daya saing hanya Rp157 miliar dari Rp6 triliun. Nah karenanya walaupun misalnya, kalau belanja saya percaya lah dengan dengan keputusan Pimpinan dengan program-program, karena saya tidak berani membuat ekspektasi tinggi bahwa dengan selesainya aspirasi kita yang nilainya cuma berapa tadi Rp330 miliar itu kemudian merubah semuanya kita menuju NTN 107. Nah, karena saya tidak tidak percaya itu.

Nah, karenanya pertama ini soal kebijakan Pak Ketua, Tangkap terutama. Jangan jadikan nelayan kita ini sebagai objek pajak ya, kita PNBPN-nya itu berikan kita apa sumbernya. Kalau kemudian ternyata sumbernya nelayan-nelayan yang nol sampai 20 GT menjadi objek pajak misalnya seperti itu ya ngapain kita punya uang tinggi-tinggi kalau kemudian kita mau meras rakyat kita. Karena saya terus terang baik di media sosial melalui Facebook, Instagram segala macam ketemu langsung itu, nelayan kita masih masih protes *kok* soal kebijakan terukur ini. Nah, padahal kita ingin nelayan kita sejahtera, tapi pada saat yang sama kita juga memajaki apa namanya, sementara banyak ketika poksi-poksi tadi perwakilan fraksi bicara tadi mereka tidak difasilitasi dengan dermaga yang baik, mereka tidak difasilitasi dengan alat tangkap yang

hebat segala macam, tapi kita masih berbicara itu. Karenanya perlu di soal kebijakan saja saya, Pak Ketua.

Karenanya sekali lagi mohon gitu ya, entah kapan kita mau dikasih, bagaimana perubahan komposisi. Kalaupun kemudian ada tambahan Rp4,5 triliun itu Pak Ketua, saya setuju, tapi jangan dimasukkan ke dalam gelondongan seperti itu, tapi Rp4,5 triliun itu adalah untuk program ya bukan dijadikan gelondongan. Keluarkan dulu dukungan manajemen itu, jangan sampai ini kan komposisi sudah 51% dukungan manajemen Pak, ini masuk lagi Rp4,5 triliun, pakai persentase 51% maka semuanya bukan lagi NTN tapi Nilai Tukar Pejabat yang tinggi, Nilai Tukar Nelayan kita tetap saja rendah.

Jadi begitu poin catatan saya adalah, kalaupun ada tambahan ya walaupun ada tambahan, tolong semuanya adalah untuk program.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik.

Terima kasih.

Fenomena anggaran itu hanya beda istilah. Kalau di Kabupaten, Kota dan Provinsi istilahnya belanja rutin. Belanja rutin selalu mendominasi, ada yang sampai 70% habis untuk belanja rutin, 30% untuk kegiatan, itupun kegiatannya juga rutin lagi, seminar, simposium ya gitu. Nah fokus dari KKP ini bahasa istilah di Kementerian ini dukungan manajemen, dukungan manajemen jangan lebih besar dibanding dengan dukungan untuk nelayan, intinya itu.

Silakan masih ada? Cukup? Silakan Bu Kiki. Iya silakan.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Mohon izin Pimpinan.

Cuma satu hal saya teringat dengan situasi hari ini terkait honorer ya. Coba SDM siapa ya karena kan hari ini kan ada peraturan yang berubah, terus masih banyak anak-anak KKP yang statusnya honorer ini mungkin mau di P3K kah atau apa, saya tahu hari ini kita punya keterbatasan. Tetapi harapan mereka juga Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang ada di sini menjadi secercah harapan lah buat mereka ya, ini tolong dipertimbangan. Karena setahu saya tidak banyak lagi jumlahnya tinggal 1.000 sekian itu kalau *nggak* salah ya, jadi kelebihannya KKP, Pak Sekjen. Pak Sekjen punya pasukan penyuluh perikanan ini solidnya luar biasa dibanding sama Pertanian, saya harus ngomong jujur. Nah ini aset, aset yang harus dijaga oleh BRSDM supaya pikirkan bagaimana nasib mereka kedepan. Saya mohon dengan segala rasa hormat ini bicara nasib hidup anak-anak Bapak semua di lapangan.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik.

Mba Alien silakan, terakhir.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Baik.

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat siang,
Salam sejahtera bagi kita semua.

Kang Dedi yang luar biasa hari ini kok sendiri?

Bapak/Ibu Anggota Komisi IV,
Pak Sekjen, beserta Eselon I dan semuanya *Insy Allah* kita selalu dalam
lindungan *Allah Subhanahu Wa Ta'ala, aamiin.*

Langsung saja. Memang kita tahu keterbatasan dan adanya tambahan
anggaran untuk KKP sangat kita harapkan, tentunya kita mau memprioritaskan
program-program apa saja yang langsung pada masyarakat dan tentunya
target ini adalah nelayan.

Berbicara tentang nilai tukar nelayan dan sebagainya sudah tentu udah
disinggung sama semuanya, tapi Pak Sekjen, saya harus sampaikan yang
kesekian kalinya karena poinnya ada Direktur Utama Perindo, Direktur Utama
Garam, dan juga apa ini Yayasan, Yayasan apa ya? Ah itulah semuanya. Saya
mau ingin sampaikan Pak Sekjen, karena memang kita berbicara tentang
proses penganggaran dan juga penambahan anggaran, saya berharap adanya
atensi bagi wilayah timur tentang kebutuhan *cold storage* dan juga kebutuhan
pabrik es dan juga *cold storage portable*. Saya berharap Bu Artati bisa
memprioritaskan kepada wilayah-wilayah Timur, saya akan cek itu Pak Sekjen.

Kemudian untuk di Pak Zaini. Tolong saya dibantu juga di wilayah-
wilayah Timur tentang alat tangkap dan juga tentunya kalau bisa adanya,
nelayan ini kan butuh sandaran untuk berlabuh, biasanya kalau memang
pelabuhannya susah disandar oleh nelayan-nelayan kecil berarti kita bisa *dong*
bikin apa namanya pelabuhan untuk sandaran kapal-kapal kecil gitu *loh* Pak
Zaini, kan itu bisa di, kalau pelabuhan besar ada di Perhubungan kita tahu, tapi
kalau untuk nelayan kecil yang untuk sandaran nelayan ada di Pak Zaini juga
kan. Tolong nanti bisa disampaikan oleh Anggota-anggota Komisi IV yang
memiliki masalah tersebut, apalagi ada Anggota Komisi IV yang punya wilayah,
yang mau menggunakan kapal ketinting itu butuh tempat sandaran nelayan.

Kemudian tentunya tadi sudah disinggung oleh Ketua saya, Pak Kang Dedi tentang *illegal fishing* karena di tempat saya selalu terjadi *illegal fishing*, jangankan antara negara, antar daerah pun sering terjadi. Saya mohon dengan sangat PSDKP dan juga untuk di Dirjen Penata Ruang Laut tolong rompong juga diatur berapa jumlah di 12 mil, berapa jumlah yang di atas dari 12 mil, sehingga kita menjadi ada patokan prioritasnya.

Kemudian untuk di budidaya Pak Tubagus Heru, saya mohon dengan sangat tadi sudah disinggung katanya Kapoksi-kapoksi, Kapoksi saya sudah sampaikan tolong ini. Tapi saya hari ini berbicara tentang rumput laut dan saya akan singgung itu terus menerus, karena memang ini salah satu peralihan pendapatan nelayan juga selain mancing, selain menangkap ikan, rumput laut ini sangat menjanjikan juga harganya. Kemarin Pak Menteri sudah sampai ke Halmahera Barat ke Maluku Utara kan beliau sudah janji juga mau membantu para nelayan yang ada di Provinsi Maluku Utara khususnya di bidang budidaya rumput laut dan kebetulan rumput laut yang ada di daerah Provinsi Maluku Utara dan hampir di masuk Sulawesi Tengah itu ada di Kabupaten Pulau Taliabu. Memang agak jauh tapi bibitnya diambil sari sana Pak setelah saya tanya. Jadi tolong kita bantu, bantu mereka di sana untuk budidaya dan juga di Tangerang. Kemarin saya turun ke Tangerang, masalah *ice-ice* itu, nah itu juga menjadi masalah. Nah tolong dibantu, tolong diberikan apa presentasi anggaran untuk langsung tujuannya ke nelayan yang kecil-kecil seperti ini.

Pak Sekjen, kemarin kita udah singgung Undang-Undang 5 Tahun 90 tentang Konservasi, saya mohon dengan sangat KKP sudah ada *draft*-nya lah karena kita *Insyah Allah* akan FGD dengan KLHK dan kita akan menyampaikan hasil dan apa saja yang terkandung di dalam air laut, air tawar, apapun itu bentuk yang ada di dalam air kalau bisa ditanggungjawabkan atau diberi beban anggaran maupun pengawasan ada di KKP, sehingga fungsi dan penjelasannya jelas. Kemudian itu KKP selesai.

Perindo, kemarin kita sudah sampaikan ke Dirutnya langsung bahwa *management* antara Perinus dan Perindo dalam pengawasan yang ada di Muara Baru tolong dengan sangat diatensi, jangan sampai berkelanjutan karena masalah ini sangat mengganggu semuanya dan kalau memang tidak mampu, kita ini kan lagi sampaikan lagi kayak kemarin bahwa memang tidak sanggup membebaskan ke anggaran negara, Perindo ini misalkan. Tapi saya berharap dengan *merger* antara Perinus dan Perindo ini bisa memberikan dampak dan manfaat bagi tata kelola yang ada di Muara Baru, baik dari pelabuhannya, baik yang di luar dari KKP ya, baik dari pasarannya, nah itu yang saya bisa sampaikan.

Kalau memang ada RDP lagi Ketua, saya sangat berharap ini karena nanti kan ada perubahan dalam nomenklatur yang disampaikan oleh KKP ke kita lagi kan, tidak sesuai dengan ini, ada perubahan-perubahan tambahan sesuai dengan kesepakatan tadi.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Terima kasih.

Semuanya sudah. Berbagai usulan, saran, pendalaman dari seluruh rangkaian kegiatan rapat hari ini sudah disampaikan dan saya lihat hari ini Pak Sekretaris Jenderal, kelihatan Jenderal. Awas Saudara kalau tidak sesuai lagi dengan keinginan para nelayan, aspirasi Anggota DPR, saya tidak akan ragu untuk memecat Saudara. Luar biasa, tepuk tangan dong, luar biasa sampai Pak Zaini itu habis rambutnya itu tadi *tuh* ya.

Baik, kita kesimpulan. Kesimpulan. Silakan dilihat.

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan mengenai Pagu Anggaran Indikatif Belanja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-353/MK.02/2022 dan B.301/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2022 tanggal 18 April 2022 sebesar Rp6.104.421.837.000,-.

Setuju?

SEKJEN KKP (Drs. ANTAM NOVAMBAR, S.H., M.Hum):

Setuju.

(RAPAT:SETUJU)

KETUA RAPAT:

2. Komisi IV DPR RI menerima dan mendukung Usulan Tambahan Pagu Anggaran Indikatif Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 sebesar Rp4.250.000.000.000,- dimana alokasi anggaran yang semula sebesar Rp6.104.421.837.000,- menjadi sebesar Rp10.354.421.837.000,-.

Setuju?

SEKJEN KKP (Drs. ANTAM NOVAMBAR, S.H., M.Hum):

Setuju.

(RAPAT:SETUJU)

KETUA RAPAT:

3. Komisi IV meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk berkomitmen menindaklanjuti saran dan masukan Anggota Komisi IV

DPR RI terutama terkait dengan program dan kegiatan bantuan pemerintah di setiap Eselon I teknis pada tahun 2023, khususnya yang bersentuhan dengan rakyat dalam rangka akselerasi pemulihan ekonomi pasca pandemi 19 menuju masa endemi.

Setuju?

F-P.GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI DESS, M.Sc):

Ketua. Saya usul.

Jangan “bersentuhan”lah Pak, tapi bagaimana meningkatkan kesejahteraan.

KETUA RAPAT:

Khususnya yang bersentuhan, iya.

F-P.GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI DESS, M.Sc):

Kalau “bersentuhan” tuh..

KETUA RAPAT (H. DEDI MULYADI, S.H./WAKIL KETUA KOMISI IV):

“Khususnya yang menyangkut dengan peningkatan kesejahteraan rakyat”, udah saja.

F-P.GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI DESS, M.Sc):

Setuju.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

“Khususnya yang menyangkut dengan meningkatkan Nilai Tukar Nelayan.”

KETUA RAPAT:

Nah oke boleh. Oke, lebih bagus.

“Nilai Tukar Nelayan dalam rangka akselerasi pemulihan”, udah. Setuju nggak ini? Setuju Anggota? Pak Sekjen?

SEKJEN KKP (Drs. ANTAM NOVAMBAR, S.H., M.Hum):

Setuju.

KETUA RAPAT:

Oke.

(RAPAT:SETUJU)

Baik.

Bapak dan Ibu RDP ini selesai..

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Pimpinan,

Sebentar.

Ada kesimpulan lainnya.

KETUA RAPAT:

Ya?

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Ini kan 3. Biasanya Komisi IV itu mengadakan meminta itu *tuh* 4, paling paling sedikit 4.

KETUA RAPAT:

Kesimpulan. Ya *sok* yang ke-4 apa?

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Karena Komisi IV harus 4 kesimpulan Pak Sekjen. Bukan, jangan ditulis.

Terakhir Pimpinan, sebelum Bapak Sekjen kita yang terhormat ini memberikan masukan dan tanggapan dari hasil rapat ini. Saya harap KKP mudah sekali dihubungi dan mudah sekali berkomunikasi, karena tidak ada yang lebih baik di antara mudahnya berhubungan baik. Mohon dengan sangat Pak Sekjen, mohon dengan sangat, karena KKP ini mitra kita dan juga kita mau berkeluarga. Bukan hanya bertemu di ruang komisi aja, tapi mudah juga bertemu di ruang-ruang yang lain. Tapi saya harap bukan di ruang yang gelap. Jadi intinya adalah jangan ada lagi salah paham di antara kita. Kalau dusta, saya pikir *nggak* ada yang dusta karena bukan punya kita ini barang, tapi setidaknya ini adalah milik negara dan diperuntukkan untuk rakyat sehingga kita sama-sama memiliki tujuan yang betul-betul mau membantu nelayan.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Tidak dimasukkan kesimpulan ya itu kesimpulan di internal KKP, sehingga seluruh jajaran Eselon I mudah dihubungi, Eselon II mudah dihubungi. Karena logikanya sederhana, kalau dihubungi oleh Anggota Komisi IV saja yang mitra kerjanya susah, apalagi dihubungi oleh masyarakat, itu sederhana logikanya. Dan sebaiknya memang Kementerian KKP 24 jam menyediakan layanan pengaduan masyarakat agar berbagai *problem* masyarakat itu bisa terjawab, ini komitmen kita. Dan saya yakin bahwa Pak Sekjen selalu ada kalimat yang di rapat di Komisi IV ada tidak akan berselingkuh mau itu di administrasi dan kebijakan.

Silakan kata penutupnya.

Terima kasih.

SEKJEN KKP (Drs. ANTAM NOVAMBAR, S.H., M.Hum):

Bapak Ketua, para Wakil Ketua, dan Bapak/Ibu Anggota Komisi IV,

Terima kasih.

Kami akan menindaklanjuti saran-saran, masukan-masukan untuk kesejahteraan rakyat seperti yang disampaikan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik.

Terima kasih komitmennya.

Semoga nilai tukar nelayan 107 bisa terwujud, meski sarana dan prasarannya masih sangat terbatas. Semoga anggaran Rp10 triliun nanti, Rp8 triliun untuk sarana dan prasarana peningkatan Nilai Tukar Nelayan. Jangan tukar harga diri nelayan dengan harga diri nelayan dari bangsa lain.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Rapat ditutup.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 13.45 WIB)

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

Ttd.

Drs. ACHMAD AGUS THOMY
NIP. 196508171988031002

